

## ABSTRAK

Henokh Albert Ware Mere, 22. 75. 7318. **Imperatif Kategoris Immanuel Kant sebagai Dasar Etis dalam Memerangi Korupsi di Indonesia.** Skripsi. Program Studi Sarjana Filsafat Agama Katolik, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero. 2026.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menjelaskan inti konsep moral imperatif kategoris Immanuel Kant, (2) meninjau korupsi dan kebijakan-kebijakan hukum penanggulangannya (3) Imperatif kategoris Immanuel Kant sebagai dasar etis dalam memerangi korupsi di Indonesia.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Objek yang diteliti adalah imperatif kategoris Immanuel Kant sebagai dasar etis dalam memerangi korupsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (buku-buku, jurnal, artikel-artikel, makalah, surat kabar dan sumber-sumber dari internet) yang berkaitan dengan objek penelitian.

Korupsi di Indonesia bukan hanya masalah hukum dan ekonomi, melainkan juga krisis moralitas etis yang merusak kepercayaan publik, integritas birokrasi, serta martabat warga negara. Pelaku korupsi kerap menyalahgunakan anggaran negara untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi memerlukan kerangka moral yang kokoh, bukan sekadar sanksi pidana.

Penelitian ini menunjukkan bahwa imperatif kategoris Immanuel Kant adalah dasar etis dalam memerangi korupsi di Indonesia. Korupsi merupakan tindakan tidak bermoral karena bertentangan dengan prinsip deontologi Kant, khususnya imperatif kategoris. Prinsip ini menyatakan bahwa tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah maksimnya dapat dijadikan hukum universal tanpa merendahkan martabat manusia. Setiap individu wajib menjalankan otonomi moral untuk menetapkan hukum bagi dirinya sendiri, bukan tunduk pada pengaruh eksternal seperti heteronomi agar memperlakukan manusia sebagai tujuan itu sendiri, bukan sekadar sarana.

**Kata Kunci:** Immanuel Kant, Imperatif Kategoris, Korupsi, Etika Deontologis

## ABSTRACT

Henokh Albert Ware Mere, 22. 75. 7318. **Immanuel Kant's Categorical Imperative as an Ethical Foundation for Combating Corruption in Indonesia.** Thesis. Bachelor's Program in Catholic Philosophy, Ledalero Institute of Philosophy and Creative Technology. 2026.

This study aims to (1) explain the core concept of Immanuel Kant's categorical imperative, (2) examine corruption and the legal policies to combat it, and (3) explore Immanuel Kant's categorical imperative as an ethical foundation for combating corruption in Indonesia.

The method used in this study is qualitative descriptive. The object of study is Immanuel Kant's categorical imperative as an ethical foundation for combating corruption in Indonesia. This study employs a literature review (books, journals, articles, papers, newspapers, and online sources) related to the research object.

Corruption in Indonesia is not merely a legal and economic issue but also an ethical moral crisis that erodes public trust, the integrity of the bureaucracy, and the dignity of citizens. Perpetrators of corruption often misuse state funds for personal gain or the benefit of specific groups. Therefore, the eradication of corruption requires a robust moral framework, not merely criminal sanctions.

This study demonstrates that Immanuel Kant's categorical imperative serves as the ethical foundation for combating corruption in Indonesia. Corruption constitutes an immoral act as it contradicts Kant's deontological principles, particularly the categorical imperative. This principle states that an action is judged good or bad based on whether its maxim can be made into a universal law without degrading human dignity. Every individual is obligated to exercise moral autonomy to establish laws for themselves, rather than submitting to external influences such as heteronomy, so as to treat humanity as an end in itself, not merely as a means.

**Keywords:** Immanuel Kant, Categorical Imperative, Corruption, Deontological Ethics